

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan (Agency Theory)

Teori keagenan (*agency theory*) yang dijelaskan oleh William R. Scott adalah ketika kepentingan atau tujuan agen bertentangan dengan prinsip, konflik akan muncul menurut teori keagenan yang merupakan penciptaan teori yang menyelidiki desain kontrak di mana agen beroperasi untuk atau atas nama prinsipal. Pembagian tanggung jawab atau perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen inilah yang menimbulkan konflik keagenan yang merupakan akibat dari tindakan perataan laba. Teori keagenan sebenarnya menunjukkan sifat kooperatif dan non kooperatif. Menurut gagasan teori keagenan, manajemen harus mengutamakan kepentingan pemegang saham, tetapi mungkin juga manajemen hanya memikirkan untuk memaksimalkan utilitasnya sendiri. Dalam jangka panjang, keputusan manajemen yang tidak sesuai dengan kepentingan perusahaan secara keseluruhan dapat merugikan kepentingan perusahaan. Akuntansi dapat digunakan oleh manajemen sebagai alat untuk rekayasa, bahkan untuk mencapai tujuannya sendiri. Masalah keagenan yang memiliki beberapa akar penyebab, termasuk yang disebabkan oleh asimetri informasi, mengacu pada konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Namun, seiring berkembangnya bisnis, ada lebih banyak perbedaan pendapat antara pemilik dan manajemen dalam hal ini, pemegang saham (investor) dan agen manajemen (direktur). Prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas tertentu, dan prinsipal bertanggung jawab atas pekerjaan agen.

Sengketa keagenan dapat terjadi akibat konflik kepentingan antara manajemen (agen) dan prinsipal. Baik prinsipal maupun agen menginginkan keuntungan yang besar. Prinsipal dan agen menghindari bahaya (Astria, 2011).

Sifat manusia, struktur organisasi, dan data adalah tiga anggapan yang mendasari teori keagenan. Praduga sifat manusia sangat menekankan betapa tidak logisnya, serakah, dan orang yang menghindari risiko. Asumsi organisasi mencakup hal-hal seperti adanya konflik di antara anggota kelompok, efisiensi sebagai metrik produksi, dan kesenjangan pengetahuan antara pelaku dan agen. Anggapan ini berpandangan bahwa pengetahuan dipandang sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan (Hanggraeni, 2015).

Hubungan keagenan juga terlihat dalam pembuatan anggaran di sektor publik. Anggaran dibuat oleh pemerintah yang ada di satuan kerja daerah dan kemudian diserahkan ke pemerintah pusat. Pemerintah yang ada di satuan kerja melaksanakan tindakan sesuai dengan rencana anggaran setelah mendapat persetujuan dari pusat, dan wajib mempertanggung jawabkan tindakan tersebut kepada pemerintah pusat untuk realisasi anggaran.

2.2 Konsep Akuntansi Sektor Publik

Akuntabilitas, pengendalian manajerial, dan penyediaan informasi merupakan tiga karakteristik dasar akuntansi sektor publik (Bastian, 2006). Sebuah perusahaan dapat dikategorikan sebagai entitas akuntansi sektor publik jika tujuannya termasuk memberikan barang dan jasa publik dalam jumlah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dan hak hukum masyarakat umum. Akuntansi sektor publik mengacu pada proses teknis dan evaluasi akuntansi yang digunakan untuk mengelola dana publik di lembaga negara dan departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, serta dalam inisiatif yang melibatkan kolaborasi publik dan swasta. Sektor. Bisnis di sektor publik beroperasi dalam situasi yang sangat rumit. Isu ekonomi, politik, budaya, dan demografi merupakan pengaruh lingkungan terhadap organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2005).

Menurut Mardiasmo (2005), Meskipun sektor publik dan swasta berbeda dalam beberapa hal, terdapat beberapa kesamaan, antara lain:

1. Sektor publik dan swasta masing-masing memainkan peran penting dalam perekonomian dan menggunakan sumber daya yang sama untuk

mencapai tujuan organisasi mereka yang unik.

2. Karena sektor publik dan swasta berjuang dengan masalah yang sama, yaitu masalah kelangkaan sumber daya, keduanya diperlukan untuk menggunakan sumber daya organisasi dengan cara yang ekonomis, efisien, dan efektif.
3. Dalam kedua bisnis tersebut, pengendalian manajemen, khususnya pengendalian keuangan, pada dasarnya sama. Untuk tugas-tugas manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengendalian, kedua industri menuntut jumlah informasi yang dapat dipercaya dan gigih yang setara.
4. Pemerintah dan sektor swasta bekerja di bidang-bidang seperti angkutan massal, pendidikan, kesehatan, pasokan energi, dan lain-lain dimana kedua sektor menghasilkan barang serupa.
5. Peraturan undang-undang dan persyaratan hukum lain yang diperlukan berlaku untuk kedua sektor.

2.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut definisinya, akuntabilitas adalah penggunaan media secara periodik untuk menilai efektivitas pelaksanaan organisasi terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Pengembangan dan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sistem akuntabilitas yang tepat, teratur, dan efisien, diilhami oleh tumbuhnya ambisi masyarakat akan pemerintahan yang unggul dan beretika (Kartim et al, 2021). Pemerintah pusat dituntut memikul dua macam tanggung jawab dalam menjalankan pemerintahan. Akuntabilitas merupakan respon vertikal pertama terhadap pemerintah. Kedua, ada kewajiban luas untuk memberikan pertanggung jawaban baik untuk legislatif maupun publik. Elemen-elemen tersebut sangat penting untuk proses akuntabilitas (Mardiasmo, 2005).

Akuntabilitas, menurut Haning (2005), adalah tentang mengungkapkan informasi tentang sumberdaya yang dialokasikan untuk tujuan tertentu, metode yang digunakan untuk menjalankan kekuasaan, dan hubungan antara metode ini dan hasil

yang diant isipasi dan dicapai. Oleh karena itu, gagasan akuntabilitas terdiri dari penyelesaian tugas dan kewajiban untuk melaporkan hasil usaha. Dari perspektif sistem, akuntabilitas memiliki beberapa karakteristik utama, termasuk fokus pada hasil, penggunaan berbagai indikator yang dipilih secara hati-hati untuk mengukur kinerja, menghasilkan data yang konsisten dari waktu ke waktu, pelaporan hasil, dan menghasilkan informasi yang berguna untuk keputusan dan kebijakan program dan secara konsisten mempostingnya (Sadjiarto, 2000).

Mengukur kinerja pemerintah sangat penting karena memungkinkan lembaga untuk dimintai pertanggungjawaban, transparan, mengelola organisasi mereka dengan lebih baik, dan meningkatkan layanan mereka kepada masyarakat umum (Halim, 2005).

Penyelenggaraan peradilan harus transparan dan akuntabel. Melalui penerapan sistem pertanggungjawaban yang dapat diverifikasi dan jujur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, masyarakat menuntut tata kelola pemerintahan yang baik dari pemerintah. Dengan demikian, penyelenggaraan pemerintahan tidak akan melakukan korupsi, kolusi, atau nepotisme. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan masalah ini (Nurina dan Yahya, 2016).

Di sektor publik, sifat akuntabilitas dapat menjadi kompleks. Menurut Ellwood (1993) persyaratan informasi bervariasi dengan basis akun. Indikator Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat dibawah ini (Ellwood, 1993):

- a. Akuntansi untuk kejujuran dan legalitas;
Akuntansi kejujuran dan legalitas berkaitan dengan jaminan bahwa telah sesuai dengan hukum dan persyaratan wajib lainnya dalam penggunaan organisasi sumber daya.
- b. Akuntabilitas Proses;
Akuntabilitas proses berkaitan dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan pekerjaan sudah memadai atau belum.

c. Akuntabilitas Program;

Akuntabilitas program mempertimbangkan apakah suatu organisasi telah mencapai tujuan yang telah ditetapkan untuk itu atau tidak.

d. Akuntabilitas Kebijakan

Akuntabilitas kebijakan, terkait dengan kebijakan dan standar apa yang ditetapkan sendiri oleh organisasi sehubungan dengan operasi organisasi tersebut.

2.4 Kepatuhan Regulasi

Sikap seseorang terhadap kepatuhan akan terlihat ketika mereka menanggapi suatu persyaratan dalam peraturan yang harus diikuti. Ketika suatu rangsangan menuntut tanggapan khusus dari orang tersebut, sikap ini berkembang (Azwar, 2002).

Persyaratan mendasar, atau standar akuntansi pemerintah, harus sesuai dengan sistem anggaran pemerintah untuk membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan. Oleh karena itu, sistem anggaran dan klasifikasi anggaran standar akuntansi pemerintahan harus sama. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem akuntansi keuangan satuan kerja di daerah harus mengikuti standar akuntansi dan anggaran pemerintah pusat (kategorisasi anggaran) (Fatmala, 2014).

Kepatuhan individu terhadap peraturan dan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara dikenal sebagai kepatuhan terhadap hukum. Entitas pemerintah wajib bertanggung jawab kepada publik atas pembagian dana yang dihimpun dari masyarakat dan digunakan untuk kepentingan bersama berdasarkan Pasal 23(5) UUD 1945 dan UU APBN (Hafiz dan Saryadi, 2017).

Negara hukum harus mengatur dan mengatur setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Hukum dan peraturan membantu menjaga ketertiban di negara dan negara bagian. Jika bertentangan, undang-undang dan peraturan yang lebih tinggi dan standar akuntansi keuangan pemerintah berlaku. Prosedur penganggaran pemerintah diselaraskan dengan standar akuntansi pemerintah, yang merupakan petunjuk untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan untuk organisasi

pemerintah. Karena itu, akun-akun dalam anggaran dan laporan keuangan harus sesuai (Savila, 2021).

Soekanto (1992) mengidentifikasi empat faktor yang diduga mempengaruhi kepatuhan seseorang, antara lain sebagai berikut:

1. Inokulasi. Manusia disosialisasikan sejak dini untuk mengikuti hukum masyarakat. Manusia diajarkan untuk memahami dan mematuhi hukum-hukum tersebut melalui proses sosialisasi.
2. Perilaku biasa. Sejak usia dini, manusia telah melalui proses sosialisasi. Lambat laun, mengikuti hukum yang berlaku menjadi kebiasaan.
3. Utilitas. Secara umum, orang cenderung memiliki kehidupan yang sehat dan rutin. Namun, apa yang pantas dan sesuai untuk satu individu mungkin tidak untuk yang lain. Akibatnya, kami memerlukan kriteria kesesuaian dan keteraturan yang dikenal sebagai aturan. Akibatnya, salah satu alasan mengapa individu mengikuti aturan adalah karena aturan itu digunakan.
4. Pengakuan kelompok. Kepatuhan merupakan sarana pergaulan dengan kelompok, yang menjadi salah satu alasan seseorang mengikuti norma.

Toha (2015) mencatat bahwa ada tiga variabel kunci yang mungkin juga mempengaruhi kepatuhan individu:

1. Kepribadian. Ciri-ciri kepribadian adalah karakteristik tidak berwujud yang dimiliki setiap orang. Saat berhadapan dengan pilihan yang membingungkan dan rumit serta kondisi yang lemah, aspek ini berdampak signifikan pada tingkat kepatuhan. Selain itu, aspek ini dipengaruhi oleh pola asuh seseorang serta jenis pendidikan yang diperolehnya. Nilai dan perilaku panutan berdampak pada kepribadian. Pendekatan pendidikan yang dianut juga berdampak pada kepribadian.
2. Kepercayaan. Tindakan seseorang sebagian besar ditentukan oleh keyakinan yang dimilikinya. Memiliki pola pikir yang setia terhadap cita-citanya akan memengaruhi cara dia mengambil keputusan. Ketika keyakinan seseorang tertanam dalam aturan, aturan itu lebih mudah diikuti. Kepatuhan berbasis

kepercayaan juga merupakan hasil dari insentif dari hukuman keras.

3. Lingkungan sekitar. Proses internalisasi yang dilakukan masyarakat akan dipengaruhi oleh nilai-nilai yang berkembang dalam suatu setting tertentu. Orang dapat mempelajari tujuan aturan, menginternalisasikannya, dan kemudian mendemonstrasikannya melalui perilaku jika mereka berada dalam konteks yang mendukung dan komunikatif. Individu akan merasa terdorong untuk menjalani proses internalisasi dalam lingkungan yang memiliki kecenderungan otoritarianisme.

Indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kepatuhan regulasi menurut Mulya dan Fauzihardani (2022) antara lain sebagai berikut:

- a. Kepatuhan dalam pelaksanaan akuntabilitas
- b. Prosedur penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan regulasi
- c. Pedoman yang digunakan untuk menyusun laporan kinerja pemerintah yang sesuai dengan regulasi.

2.5 Kejelasan Sasaran Anggaran

Jika ingin dijadikan tolok ukur untuk melaksanakan tugas kinerja yang diantisipasi, perencanaan anggaran pemerintah harus dapat secara eksplisit menentukan target kinerja. Menurut Kenis (1979), kejelasan tujuan anggaran mengacu pada sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan maksud agar anggaran dapat dipahami oleh personel yang bertanggung jawab untuk mencapai tujuan anggaran tersebut. Tujuan APN atau APBD harus akurat, mudah dipahami, dan diartikulasikan dengan baik untuk individu yang bertanggung jawab atas eksekusi.

Pengeluaran negara merupakan salah satu cara pemerintah dalam melaksanakan rencana kerja pelaksanaan pembangunan. Pengeluaran pemerintah untuk hal-hal seperti pendidikan, penyediaan infrastruktur, dan subsidi, antara lain, tidak dapat dirasakan oleh masyarakat umum sampai proses pengeluaran selesai. Belanja negara merupakan salah satu pilar strategis penyelenggaraan pemerintahan. Struktur mekanisme pembelanjaan harus memungkinkan pelaksanaan proses

pembelanjaan yang diatur. Meskipun pemerintah adalah perusahaan nirlaba dan tidak dipaksa untuk menghasilkan keuntungan, hal ini tidak memberi mereka kekuasaan penuh untuk membelanjakan uang sesuai keinginan mereka. Karena sebagian besar kebocoran APBN justru terjadi pada saat pelaksanaan belanja, auditor pemerintah juga memberikan perhatian lebih pada audit belanja. Kebocoran ini bisa disebabkan oleh adanya praktik KKN atau ketidaktahuan birokrat negara dalam melakukan proses pembelian (Hesda, 2017).

Pengeluaran negara yang disalahgunakan dapat mengambil dikategorikan dalam beberapa bentuk, termasuk 1) *overspending* (belanja di atas yang diperlukan), 2) *misspending* (belanja di bawah yang diperlukan), 3) *underspending* (belanja yang tidak dilaksanakan), dan 4) *fraud spending* (belanja yang melanggar hukum). Ada sejumlah penyebab yang menyebabkan kesalahan proses pengeluaran ini, tetapi kategori 1), 2), dan 3) terutama dipengaruhi oleh kurangnya pengetahuan pembelian birokrat negara. Di sisi lain, kategori 4) disebabkan oleh pejabat negara yang tidak jujur yang dengan sengaja membelokkan cara pelaksanaan belanja (Hesda, 2017).

Proses pembuatan anggaran dan proses pengeluaran uang sebenarnya tidak dapat dipisahkan. Bagaimana uang dibelanjakan memiliki dampak yang signifikan pada proses penganggaran. Penyusunan anggaran didorong untuk lebih terukur dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja saat ini. Hasil yang akan diperoleh harus menjadi dasar bagi semua perencanaan anggaran dengan metode ini. Kita dapat mengevaluasi seberapa efektif uang dibelanjakan menggunakan indikator keluaran ini. Akibatnya, kualitas keluaran menentukan seberapa baik uang dibelanjakan. Sementara output yang buruk dapat menghasilkan hasil yang kurang ideal dan pengeluaran yang tidak produktif, output yang baik akan menghasilkan hasil dan penghargaan yang menguntungkan. Selain itu, analisis kebutuhan menghasilkan keluaran yang berkualitas tinggi (Hesda, 2017).

Pelaksana anggaran merespon dengan baik dan cukup kuat untuk meningkatkan kejelasan tujuan anggaran, menurut Kenis (1979). Ketika target anggaran dinyatakan secara efektif, hasilnya adalah peningkatan kinerja anggaran, pengurangan efisiensi biaya dalam implementasi anggaran, dan peningkatan sikap

karyawan terhadap anggaran. Sasaran anggaran harus didefinisikan dengan jelas sehingga anggota staf yang bertanggung jawab untuk mencapainya dapat memahami anggaran.

Kejelasan target anggaran merupakan salah satu standar keterbukaan pemerintah. Target menunjukkan sejauh mana tujuan yang diimplementasikan dapat dicapai. Alat ini melakukan banyak upaya untuk menyelesaikan tugas. Oleh karena itu dibandingkan dengan tujuan yang tidak memenuhi kriteria utama yaitu tujuan harus spesifik, tidak memihak, tujuan harus menuntut, tetapi dapat dengan mudah dicapai, tujuan yang jelas terkait anggaran akan mendorong manajer untuk lebih produktif dan mengejar keunggulan (Samuel, 2008).

Berikut indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk menilai kejelasan sasaran anggaran menurut Kenis (1979): Tujuan harus spesifik, terukur, realistis, dan berorientasi pada hasil akhir. Tujuan khusus adalah tujuan yang difokuskan pada hasil akhir atau efek yang ingin dicapai daripada proses atau cara mencapainya. Sasaran terukur adalah sasaran yang dinyatakan dalam satuan ukuran tertentu sehingga memudahkan penilaian tingkat pencapaian. Tujuan yang realistis adalah tujuan yang terfokus pada target dan harus dapat dicapai.

2.6 Pengendalian Internal

Pengendalian internal, secara umum, merupakan komponen dari setiap sistem yang digunakan sebagai prosedur dan arahan untuk pelaksanaan operasional bisnis atau organisasi tertentu. Pengendalian internal adalah prosedur yang diterapkan dalam pengaturan bisnis oleh manajemen puncak (dewan direksi). Pengendalian internal dimaksudkan untuk memberikan jaminan bahwa tujuan organisasi secara keseluruhan akan terpenuhi. Alvin dkk. (2015) menegaskan bahwa faktor risiko yang dapat digunakan untuk mengendalikan risiko menurun seiring dengan meningkatnya efektivitas pengendalian internal.

Menurut Mulyadi (2002), tujuan pengendalian intern adalah sebagai berikut:

1. Keakuratan data keuangan Karena adanya pengendalian internal ini, manajemen bertugas membuat laporan keuangan untuk khalayak internal

- dan eksternal perusahaan. Informasi yang diberikan harus dapat dipercaya.
2. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang relevan Pengendalian internal ini dirancang untuk memastikan bahwa organisasi beroperasi sesuai dengan semua peraturan dan peraturan yang relevan.
 3. Efektivitas dan efisiensi operasi Pengendalian internal adalah mekanisme yang digunakan oleh bisnis untuk mengurangi praktik pemborosan dan penggunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien untuk operasi bisnis.
- d. Keterbatasan Bawaan Pengendalian Internal Menurut Mulyadi (2002), berikut adalah batasan bawaan dalam pengendalian internal: kesalahan dalam penilaian, gangguan, kolusi, dan pengabaian manajemen.

Berikut indikator pengendalian internal dalam penelitian ini menurut Mulya dan Fauzihardani (2022): Pemisahan fungsi, proses otorisasi, prosedur dokumentasi, dan prosedur dan pencatatan akuntansi hanyalah beberapa contoh. Pengamatan fisik. Pengendalian intern yang tidak dibatasi.

2.7 Sistem Pelaporan

Sistem, menurut Bonnie Soeherman dan Marion Pinontoan (2008), adalah kumpulan elemen yang berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Bagian-bagian yang membentuk suatu sistem adalah komponen-komponen atau ciri-cirinya, seperti:

- a. Objek adalah variabel atau elemen penyusun.
- b. Karakteristik sistem dan kepemilikan objeknya, yang menentukan kualitas atau jenisnya.
- c. Hubungan internal adalah koneksi yang dibuat oleh objek sistem.
- d. Lingkungan, sering dikenal sebagai lokasi fisik sistem.
Setiap sistem memiliki tujuan, dan tujuan ini berfungsi sebagai kekuatan pendorong sistem.
- e. Tujuan. Tanpa tujuan, sistem merosot menjadi kekacauan. Tentu saja, tujuan dari berbagai sistem berbeda satu sama lain.
- f. Input adalah sesuatu yang memasuki sistem dan kemudian berubah menjadi bahan pemrosesan.

- g. Bagian (informasi) yang bermanfaat dan berharga dari suatu proses atau bagian yang tidak efektif adalah bagian yang bergeser dari masukan ke keluaran (pemborosan).
- h. Output adalah apa yang dihasilkan oleh operasi. Dalam sistem informasi, informasi dapat berupa laporan, informasi, dll.
- i. Batas: Garis yang membagi interior sistem dari eksteriornya. Tetapkan batasan di sini untuk menentukan konfigurasi atau kemampuan sistem. Batas juga dapat disesuaikan atau dimodifikasi untuk mengubah perilaku sistem.
- j. Input atau proses dapat dikontrol menggunakan metode kontrol dan umpan balik. Tujuannya adalah untuk mengatur sistem agar berfungsi sebagaimana mestinya.

Sistem pelaporan adalah dokumen yang menguraikan rantai komando dari bawahan (seperti kepala unit anggaran) ke atasan (kepala bagian anggaran). Pelaporan kinerja, menurut Indra Bastian (2010), merupakan cerminan dari kebutuhan untuk menyajikan dan melaporkan kinerja semua kegiatan dan sumber daya yang diperlukan. Proses akuntabilitas kinerja ditampilkan dalam pelaporan ini. Setiap organisasi pemerintah diwajibkan untuk menulis, mengumpulkan, dan melaporkan laporan keuangan secara kelembagaan secara teratur. Situasi keuangan transaksi yang dilakukan oleh instansi pemerintah digambarkan dalam laporan keuangan entitas tersebut.

Tujuan pelaporan kinerja adalah untuk menyampaikan keberhasilan kinerja organisasi pemerintah dalam satu tahun anggaran yang terkait dengan pencapaian tujuan dan sasaran mereka. Dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) menguraikan pelaporan kinerja oleh entitas pemerintah. Pemerintah diharuskan untuk menawarkan data keuangan dan lainnya yang akan digunakan oleh pihak yang berkepentingan untuk membuat keputusan ekonomi, sosial, dan politik.

Prosedur untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan data terkait disarankan oleh akuntansi dan pelaporan keuangan untuk mendukung pengambilan keputusan dan menilai kinerja organisasi. Menurut Mardiasmo (2005), laporan keuangan resmi dari organisasi pemerintah seperti laporan surplus/defisit, laporan realisasi anggaran, laporan pendapatan, laporan arus kas, dan ringkasan kinerja dengan menggunakan indikator keuangan dan non keuangan harus dapat dihasilkan. Akuntabilitas kinerja sistem harus ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Pemerintah Daerah, dan laporan harus disampaikan. Pembuatan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan tanggung jawab pegawai yang secara fungsional bertugas menangani tugas administrasi di instansinya masing-masing.

Selain itu, pimpinan lembaga dan kelompok kerja perlu dimintai pertanggungjawaban dan menunjukkan apakah tingkat kinerja yang dicapai berhasil atau tidak. Suatu organisasi, alat, atau metode akuntabilitas yang dikenal sebagai sistem akuntabilitas kinerja pada dasarnya mencakup tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, pelaporan, pengendalian, dan pemantauan. digunakan untuk memenuhi komitmen kepada pejabat pemerintah dalam ruang lingkup pertanggungjawaban atas kegagalan terkait misi organisasi (Herawaty, 2011).

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penelitian ini untuk mengevaluasi Sistem Pelaporan menurut Mulya dan Fauzihardani (2022) adalah sebagai berikut: penyebab ketidakkonsistenan, tindakan yang dilakukan, dan waktu yang diperlukan untuk memperbaikinya.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

NO	Judul Penelitian	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Pengaruh Kejelasan Sasarn Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelporan terhadap	(Mulya dan Fauzihardani, 2022)	Variabel Independen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, dan Sistem	Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja

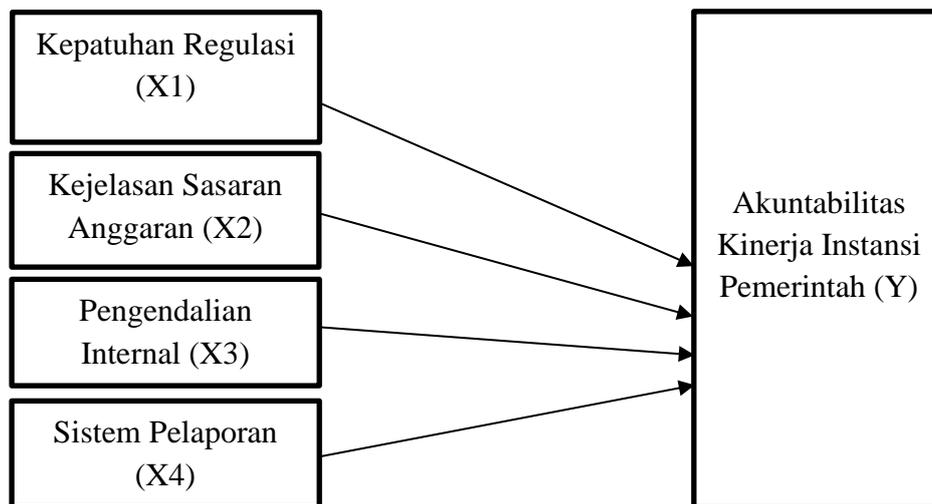
	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan Kepatuhan Terhadap Regulasi Sebagai variabel pemoderasi		Pelaporan Variabel peoderasi: Kepatuhan Terhadap regulasi	Instansi Pemerintah, Kejelasan Sasaran Anggaran berpengaruh. Kepatuhan terhadap regulasi dapat memoderasi.
2	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Transparansi Publik terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Pada OPD Kabupaten Klaten	(Gibor, 2021)	Variabel Indepen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Transparansi Publik	Semua variabel uji Independen berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah
3	Pengaruh Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Aparatur terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	(Putri <i>et.,al</i> , 2015)	Variabel Indenpen: Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Aparatur	Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Kompetensi Aparatur berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
4	Pengaruh Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran dan ketaatan peraturan perundang-undangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi	(Kartim <i>et. al</i> , 2021)	Variabel Independen: Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, Kejelasan Sasaran Anggaran, Ketaatan peraturan perundang-undangan	Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan, ketaatan perundang-undangan berpengaruh. Kejelasan Sasaran Anggaran tidak berpengaruh

	pemerintah (studi empiris pada perangkat daerah Kabupaten Jayapura)			
5	Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, Pemahaman Akuntansi, dan Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (pada Satuan Perangkat Daerah Kabupaten Sampang)	(Karima <i>et. al.</i> , 2021)	Variabel Independen: Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah, Pemahaman Akuntansi, Ketaatan Pada Peraturan Perundang-Undangan	Semua variabel Independen dalam penelitian ini berengaruh secara simultan
6	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rokan Hulu)	(Wahyuni <i>et.al.</i> 2021)	Variabel Independen: Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan	Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sedangkan Pengendalian Akuntansi tidak berpengaruh

2.9 Kerangka Pemikiran

Salah satu contoh bagaimana pemerintah memeberikan dokumentasi atas tindakannya di masa lalu adalah Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dimaksudkan agar instansi pemerintah dapat menjadi satuan kerja yang akuntabel, akurat, dan transparan. Untuk menentukan apa yang mungkin berdampak pada evaluasi akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah. Kesimpulannya, grafik berikut menunjukkan indikator penelitian sebagai berikut:



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

2.10 Bangunan Hipotesis

2.10.1 Kepatuhan Regulasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Persyaratan mendasar, standar akuntansi pemerintah, harus sesuai dengan sistem anggaran pemerintah saat membuat dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan. Oleh karena itu, system anggaran dan klasifikasi anggaran standar akuntansi pemerintahan harus sama. Artinya, sistem akuntansi keuangan pemerintah harus mengikuti persyaratab akuntansi dan anggaran pemerintah (Fatmala, 2014).

Unit Satuan Kerja Kementerian Perindustrian yang berada di Daerah harus mengikuti serta mematuhi regulasi yang telah dibuat dan disepakati oleh Inspektur Jenderal dan Menteri Perindustrian yang berkaitan dengan Penyusunan Laporan Keuangan sampai pelaporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Karima et al (2021) dan Kartim et al (2021) melakukan penelitian mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang menunjukkan indikator Kepatuhan terhadap Perundang-Undangan terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan dari teori-teori yang telah diuakikan dapat disimpulkan hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah:

H1 : Terdapat pengaruh antara Kepatuhan Regulasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.10.2 Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Perencanaan anggaran daerah harus dapat secara jelas menentukan tujuan kinerja karena anggaran pemerintah harus dapat dijadikan sebagai standar untuk mencapai kinerja yang diharapkan. Menurut Sasongko (2010), anggaran adalah daftar tugas yang harus dilakukan oleh manajemen yang didasarkan pada data kuantitatif, yaitu data yang diperoleh dari kuantitas komoditas dan harga jual untuk tahun yang akan datang. Proses mengembangkan anggaran dikenal sebagai penganggaran. Proses penentuan jumlah pembiayaan untuk setiap program dan kegiatan di dalam setiap unit moneter disebut sebagai anggaran ini. Di sektor publik, perencanaan anggaran harus dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Satuan Kerja Kementerian Perindustrian di Daerah harus bertanggung jawab kepada Instansi Pusat dalam hal ini Inspektorat Jenderal Kementerian Perindustrian dalam pelaksanaannya dalam melakukan klasifikasi, penggunaan, dan realisasi anggaran. Kegiatan yang ditargetkan adalah salah satu yang mengimplementasikan dirinya sendiri dengan menggunakan anggaran.

Kejelasan Sasaran Anggaran merupakan salah satu variabel yang termasuk dalam kajian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Mulya dan Fauzihardani (2022). Temuan penelitian ini menunjukkan bagaimana transparansi sasaran anggaran dapat berdampak pada akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan dari teori-teori yang telah diuraikan dapat disimpulkan hipotesis ke dua dalam penelitian ini adalah:

H2 : Terdapat Pengaruh antara Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.10.3 Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Pengendalian adalah prosedur yang membantu organisasi mencapai tujuannya dan mendukung operasinya sehingga seluruh manajemen mengikuti rencana. Tujuan pengendalian adalah untuk menghindari potensi kesalahan.

Pengendalian internal, menurut Mulyadi (2016), memerlukan proses, struktur, dan tindakan organisasi yang terkoordinasi yang digunakan untuk melindungi aset organisasi, memastikan kebenaran dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong kepatuhan terhadap prinsip-prinsip manajemen.

Setiap Satuan Kerja Pemerintah harus melakukan Pengendalian Internal karena sangat penting untuk menentukan seberapa baik peraturan telah dilaksanakan. Pegawai keuangan harus melakukan Pengendalian Intern untuk melapor kepada Kepala Subbagian Keuangan, yang selanjutnya wajib melapor kepada Kepala Satuan Kerja.

Pengendalian Intern dapat berpengaruh secara signifikan baik secara parsial maupun simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sesuai hasil penelitian Aprilianti et al (2020) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan menggunakan Pengendalian Intern sebagai salah satu variabel penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian dan tujuan dari teori-teori yang telah diuraikan dapat disimpulkan hipotesis ke tiga dalam penelitian ini adalah:

H3 : Terdapat pengaruh antara Kepatuhan Regulasi Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2.10.4 Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Salah satu faktor yang mempengaruhi akuntabilitas kinerja adalah sistem pelaporan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong akuntabilitas. Saat mengikuti anggaran yang ditetapkan, pemantauan kinerja manajerial memerlukan sistem pelaporan yang dapat diandalkan (Hilmi, 2004). Laporan yang baik harus ditulis dengan jujur, tidak memihak, dan jelas (BPKP, 2011). Selain itu, penting untuk menyoroti kualitas laporan yang baik berikut ini: penerapan, ketepatan waktu, kredibilitas, keandalan, akurasi, daya tarik (tegas dan konsisten, tidak bertentangan antar bagian), keterbandingan yang tinggi, keterverifikasian, kelengkapan, netralitas, soliditas, dan standarisasi (untuk rutinitas dan tujuan) (Kartim et al, 2021).

Dalam hal ini, Satker Kemenperin di Daerah perlu menerapkan Sistem Pelaporan yang baik untuk mendukung temuan penilaian Inspektur Jenderal Kemenperin mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di masing-masing Satker di daerah. Sistem Pelaporan yang baik mendukung hasil output dan outcome yang baik.

Berdasarkan hasil penelitian Aprilianti et al (2020) tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dengan menggunakan Sistem Pelaporan sebagai salah satu variabel penelitian, variabel ini berpotensi mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara signifikan baik secara parsial maupun simultan.

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan tujuan dari teori-teori yang telah diuraikan, dapat disimpulkan hipotesis ke empat dalam penelitian ini adalah:

H4 : Terdapat pengaruh antara Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.